

PROVINSI RIAU



RENCANA KERJA TAHUNAN 2017 (R K T)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (goodpublic governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Lagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah telah berupaya untuk mendefenisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusi maupun alternative pemecahan masalah tersebut. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian dimasa yang akan datang.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH
PROVINSI RIAU**

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904 199703 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2.	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017 Berdasarkan Golongan	6
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator BKD Tahun 2017	12
Tabel 3.1.	Alokasi Keuangan BKPPD Provinsi Riau Tahun 2017	17

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum	2
B.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	2
B.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	5
B.3. Keadaan Pegawai	6
C. Landasan Hukum	6
D. Maksud dan Tujuan	9
BAB II : RENCANA STRATEGI	10
A. 1. Visi dan Misi	10
A. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator	11
A.2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator	11
BAB III : RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	13
A. Program dan Kegiatan	13
B. Alokasi Anggaran	17
BAB IV. : PENUTUP	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang mempunyai peran sebagai pembina dan pengembang sumber daya aparatur daerah Riau. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang dan tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan serta manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan perencanaan dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan dinamis. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dan mensukseskan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. RKT ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian di masa yang akan datang.

B. Gambaran Umum

B. 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4). Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

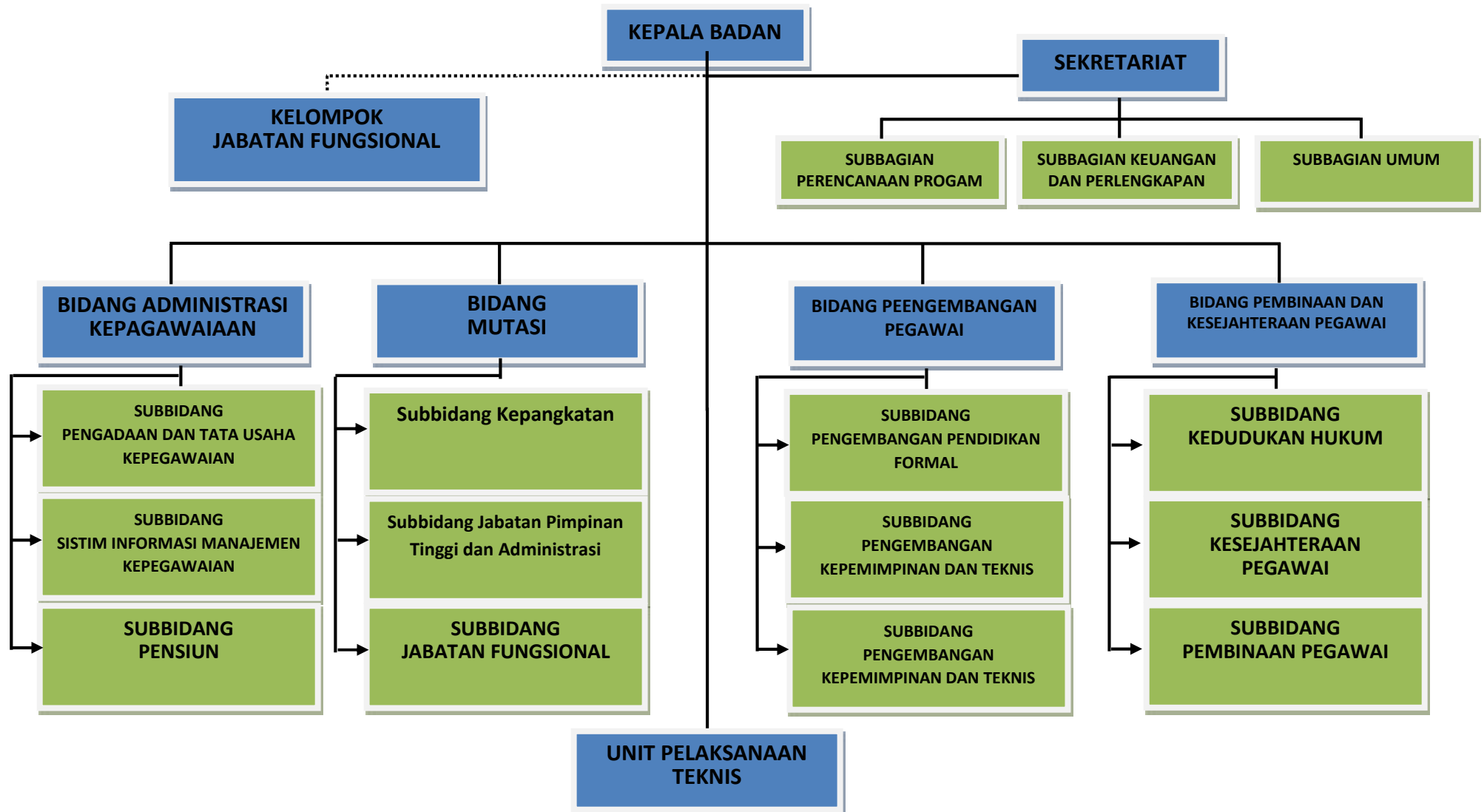
- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian;
 2. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
 3. Subbidang Pensiun.
- d. Bidang Mutasi, terdiri atas:
 1. Subbidang Kepangkatan;
 2. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; dan
 3. Subbidang Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
 - 2. Subbidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan Teknis; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Pendidikan Fungsional.
- f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Kedudukan Hukum;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan Pegawai.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



B. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa BKD Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKD Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. 3. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31 Januari 2017 sebanyak 138 orang dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017
Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
83	55	164

Dari data berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat bahwasanya jenis kelamin laki-laki sebanyak 83 orang (60%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang (40%). Dari jumlah tersebut maka ditampilkan data berdasarkan golongan sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017
Berdasarkan Golongan**

Ket	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV
Jumlah	1	19	101	17
Total	138			

Sedangkan data berdasarkan golongan dan jenis kelamin terdapat golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak 101 orang dan golongan IV sebanyak 17 orang.

C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
 19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana kerja yang menjadi target pencapaian tahun 2017 sehingga dapat menjadi instansi yang akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2017 adalah dapat mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawain Daerah dan sebagai perwujudan salah satu kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan manfaat antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Kepegawain Daerah provinsi Riau,
- b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah Badan kepegawain Daerah provinsi Riau,
- c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawain Daerah provinsi Riau dimasa yang akan datang,
- d. Meningkatkan Kredibilitas Badan kepegawain Daerah provinsi Riau dimata instansi pemerintah lainnya,
- e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Riau.

BAB II

RENCANA STRATEGI

A. Rencana Strategik

A. 1. Visi dan Misi

Visi dan misi memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu perumusan visi dan misi perlu dilakukan secara seksama dengan melibatkan berbagai stakeholders yang terkait dengan tupoksi. Secara konseptual, Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Sebagai sebuah tujuan, visi bukan sekedar harapan maupun mimpi. Visi merupakan tujuan yang dapat diperkirakan kapan dapat dicapai. Selain itu juga bagaimana cara mencapainya.

Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Visi Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

“Terwujudnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau yang Profesional, Akuntabel dan Sejahtera Menuju Visi Riau 2025”

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, maka perlu adanya Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai pendukung dalam melaksanakan Visi tersebut.

Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan memperhatikan lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal. Aspek internal menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek eksternal menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi dan telaah lingkungan strategis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Mutu Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau;
- 2) Mengembangkan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan Tata Pemerintah yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Government); dan
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima.

A. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2017

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	9
1.	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	1.1. Persentase peningkatan kualitas Manajemen aparatur sipil negara	2,50%
2.	Terwujudnya Sistem Manajemen ASN secara Profesional dan Modern	2. Terwujudnya Sistem Manajemen Pegawai ASN yang profesional dan modren serta Peningkatan Pelayanan Manajemen ASN berbasis sistem informasi teknologi	2.1. Presentase peningkatan sistem manajemen ASN yang dilaksanakan	55%
			2.1. Presentase peningkatan pelayanan manajemen ASN	75%
		3. Meningkatnya Kualitas Layanan Internal SKPD	3.1. Mewujudkan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Yang Baik	90%
			3.2. Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai dengan Standar Kerja	90%
			3.3. Menigkatnya kualitas dan disiplin sumber daya aparatur	12%
			3.4. Nilai akuntabilitas, persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan	B. 93

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, maka pada tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan dapat tergambar sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKD Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada tahun anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melaksanakan 11 program dan 83 kegiatan terdiri dari:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan jasa keamanan kantor
13. Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau expo)
14. Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pembinaan fisik dan mental aparatur
3. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
4. Pemantauan disiplin PNS
5. Penanganan Kasus-kasus kepegawaian
6. Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN
7. Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara
2. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau
3. Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
6. Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

VI. Program Pendidikan Kedinasan

1. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)
3. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
4. Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau
2. Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang
3. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur
4. Seleksi Asesor Provinsi Riau

5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau
6. Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI

VIII. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

1. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
2. Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
3. Satya Lencana Karya Satya
4. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau
5. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD
6. Monitoring IPDN
7. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara
8. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011
9. Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau
10. Pengadaan Aparatur Sipil Negara
11. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
12. Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat
13. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)
14. Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau
15. Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI
16. Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan
17. Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau
18. Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau
19. Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau
20. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau
21. Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi
22. Penyusunan Materi/Alat Test
23. Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau

IX. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

1. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS
2. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau
3. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu
4. Pengelolaan administrasi izin belajar
5. Pengelolaan Administrasi kepegawaian
6. Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik
7. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau
8. Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
9. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
10. Pengelolaan data kepegawaian
11. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
12. Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
13. Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur Pelayanan Publik
14. Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

X. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

1. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS
2. Pengelolaan Pensiun PNS

XI Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

1. Konsultasi dan Bantuan Hukum

B. Alokasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja tidak langsung (BTL) adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan (Gaji Pegawai) dan sedangkan Belanja langsung (BL) belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang sifatnya untuk mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat tergambar dalam table berikut ini :

Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKD Provinsi Riau Tahun 2017

No.	Uraian	Pagu	Persentase (%)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 17.496.695.838,57	37%
2	Belanja Langsung	Rp. 29.185.870.492,00	63%
	TOTAL	Rp. 46,682,566,330.57	100 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2017 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

B. Saran

Saran merupakan suatu masukan atau anjuran yang bersifat baik dan membangun oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur dan masyarakat.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau maupun dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.